

ABSTRAK

KEDUDUKAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM ANAK DARI SEWA RAHIM (*SURROGATE MOTHER*) MENURUT HUKUM PERDATA

Oleh:

Nuresa Divani Amanda

Infertilitas mendorong pasangan dengan indikasi medis untuk mendapatkan keturunan melalui prosedur bayi tabung, beberapa dekade kemudian prosedur ini berkembang dengan adanya teknologi donor dan ibu pengganti (*Surrogate Mother*). *Surrogate Mother* melakukan perjanjian sewa rahim dengan pasangan suami istri (*Intending Couple*) untuk mengandung dan melahirkan embrio keduanya dengan imbalan atas jasanya. Keabsahan dan status anak yang dilahirkan oleh *Surrogate Mother* menjadi perhatian di beberapa negara, di Indonesia sendiri belum ada aturan khusus yang membahas bagaimana kedudukan dan perlindungan hukum anak yang lahir melalui prosedur surogasi. Penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan bagaimana hubungan hukum antara anak dengan *Intending Couple* dan *Surrogate Mother*, juga untuk menganalisis bagaimana perlindungan hukum terhadap hak anak yang dilahirkan dari proses sewa rahim. Jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum normatif bertipe preskriptif analitis. Pendekatan yang digunakan adalah perundang-undangan, konseptual dan komparatif. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal dan sumber lainnya yang dikumpulkan dengan metode *library research* kemudian dianalisis menggunakan interpretasi hukum preskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan hukum antara anak dengan *Intending Couple* dan *Surrogate Mother*, yaitu bahwa *Intending Couple* tidak berkedudukan sebagai ibu kandung dari anak sewa rahim. Dalam hal ini Ibu yang melahirkan (*Surrogate Mother*) yang menjadi ibu kandung dan memiliki hubungan keperdataan dengan anaknya. Perlindungan hukum hak anak dari sewa rahim di Indonesia belum diatur sebagaimana di India dan Tailan, yang mengakibatkan anak tersebut berkedudukan sebagai anak luar kawin yang hanya memiliki hubungan nasab dengan ibu yang melahirkannya dan tidak dengan *Intending Couple*. Anak berhak atas nafkah dan perwalian ayah biologisnya melalui prosedur adopsi tetapi tidak berhak atas hak waris, dalam hal ini anak mendapatkan wasiat (*testament*) dari orang tua angkatnya. Saran yang dapat diberikan adalah kepada pemerintah Indonesia agar merevisi peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang keluarga dan perkawinan, untuk memberikan kepastian hukum terkait perlindungan kepada anak hasil surogasi.

Kata Kunci: *Intending Couple*, Kedudukan Anak, Perlindungan Hukum, *Surrogate Mother*.

ABSTRACT

THE LEGAL STATUS AND PROTECTION OF CHILDREN BORN THROUGH SURROGACY (SURROGATE MOTHERHOOD) UNDER THE CIVIL LAW

By:

Nuresa Divani Amanda

Infertility has driven couples with medical indications to pursue parenthood through in vitro fertilization (IVF). Over the past decades, this procedure has developed with the introduction of donor technologies and surrogacy arrangements (surrogate motherhood). In the surrogacy agreement, a surrogate mother enters into gestational agreement with a married couple (intending couple) to conceive, carry, and give birth to their embryo in return for compensation for her services. The legality and legal status of children born through surrogacy have become matters of concern in several countries. In Indonesia, there is no specific regulation governing the legal status and protection of children born through surrogacy. This study aims to examine the legal relationship between the child, the surrogate mother and the intending couple, as well as to analyze the legal protection afforded to the rights of children born through surrogacy. This research is part of normative legal research with a prescriptive-analytical approach. The study uses the statute approach, conceptual approach, and comparative approach. The data used is secondary data that sourced from legislations, books, journals and another resource which were collected through library research method, the data is analyzed using prescriptive-analytical legal interpretation. From this research, we can conclude that the legal relationship between the child and the Intending Couple and Surrogate Mother is that the Intending Couple does not hold the status as the biological mother. In this case, the mother who gives birth (the Surrogate Mother) is the biological mother who has legal relationship with the child. The legal protection of surrogacy's children in Indonesia has not been regulated as in India and Thailand, which leads to the child being considered illegitimate and having a lineage relationship only with the Surrogate Mother and not with the Intending Couple. The children are entitled to support and guardianship from their biological father through the adoption process, but they are not entitled to inheritance rights. In this case the children receive a will (testament) from the adoptive parents. The suggestion that can be given is that Indonesian government to revise the legislation governing family and marriage, in order to provide legal certainty regarding the protection of children born through surrogacy.

Keywords: Intending Couple, Legal Status of Children, Legal Protection, Surrogate Mother.